

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi SIPD RI dalam prosedur pengajuan SP2D uang persediaan di DPM-PTSP Provinsi Jambi telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini mempermudah proses administratif, mempercepat alur pencairan dana, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses pengajuan SP2D uang persediaan yang melibatkan Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD, dan Pengguna Anggaran telah dilaksanakan secara tertib dan terstruktur. Seluruh pihak menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, sehingga prosedur dapat berjalan lancar. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan prosedur, kecuali gangguan teknis akibat pemadaman listrik yang bersifat sementara dan tidak memengaruhi efektivitas sistem secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SIPD RI di DPM-PTSP Provinsi Jambi telah mendukung tata kelola keuangan yang efisien, akuntabel, dan sesuai standar, serta dapat terus dioptimalkan seiring perkembangan teknologi ke depan.

4.2 Saran

DPM-PTSP Provinsi Jambi disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan SIPD RI dalam proses pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan. Sistem ini terbukti mempermudah proses administratif dan mempercepat pencairan dana yang bersifat penting bagi kelancaran kegiatan operasional. Meskipun sistem telah berjalan efektif, pelatihan rutin bagi pegawai perlu dilakukan untuk memastikan pemahaman yang merata dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem tetap terjaga, terutama saat terjadi pembaruan sistem atau regulasi terbaru. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antar instansi atau wilayah lain yang juga menggunakan SIPD RI, guna mengetahui sejauh mana sistem ini memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian mendatang juga dapat memperluas ruang lingkup dengan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih general dan mendalam.